

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP GOOD COORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA RSUD DR SALIM ALKATIRI
KABUPATEN BURU SELATAN**

***APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES TO PERFORMANCE DR SALIM ALKATIRI
HOSPITAL IN BURU SELATAN DISTRICT***

ARY FAUZAN HENALU

K052211005



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA RSUD DR SALIM ALKATIRI KABUPATEN
BURU SELATAN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh

ARY FAUZAN HENALU
K052211005

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP GOOD COORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA RSUD DR SALIM ALKATIRI KABUPATEN BURU SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ARY FAUZAN HENALU
K052211005**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H. Amran Razak, SE, M.Sc
NIP. 19570102 198601 1 001


Dr. Balqis, SKM, M.Kes, M.Sc.PH
NIP. 19790817 200912 2 001

Dekan Fakultas
Kesehatan Masyarakat

Ketua Program Studi S2
Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan


Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, M.Sc.PH, Ph.D
NIP. 19720529 200112 1 001


Prof. Dr. Indar, SH, MPH
NIP. 19531110 198601 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ary Fauzan Henaulu**
NIM : K052211005
Program studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulissan saya berjudul :

PENERAPAN PRINSIP GOOD COORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA RSUD DR SALIM ALKATIRI KABUPATEN BURU SELATAN

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Juli 2023.

Yang menyatakan



Ary Fauzan Henaulu

ABSTRAK

ARY FAUZAN HENAU LU. PENERAPAN PRINSIP GOOD COORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA RSUD DR SALIM ALKATIRI KABUPATEN BURU SELATAN (dibimbing oleh Amran Razak Dan Balqis)

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) bagi rumah sakit merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk dapat mengikuti aturan yang berubah dan akan selalu berubah. Tata kelola yang baik dapat membuat seluruh stakeholder rumah sakit merasakan keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan *cross sectional* yang mana peneliti melakukan pengukuran variabel sebanyak satu kali dan pengukuran variabel dilakukan pada saat pemeriksaan tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Sampel dalam penelitian ini yaitu 228 pegawai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data univariat, bivariat dan multivariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan akuntabilitas (*accountability*) ($p=0,004$) dan kemandirian (*independency*) ($p=0,001$) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan, serta tidak ada hubungan pertanggungjawaban (*responsibility*) ($p=0,121$) dan kewajaran (*fairness*) ($p=0,121$) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan. Berdasarkan uji multivariat variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kemandirian (*independency*) dengan nilai B (1,092) dan OR (2,980) yang menunjukkan bahwa pengaruh kemandirian (*independency*) memiliki peluang lebih besar terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan *good corporate governance*, selain itu diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kinerja yang sering terjadi pada suatu perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Kinerja, Rumah Sakit.



ABSTRACT

ARY FAUZAN HENAU LU. APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES TO PERFORMANCE DR SALIM ALKATIRI HOSPITAL IN BURU SELATAN DISTRICT (supervised by Amran Razak and Balqis)

Good governance in hospitals is the initial and essential measure to adapt to evolving regulations, which are subject to constant change. It ensures that all stakeholders in the hospital experience fairness, transparency, independence, accountability, and responsibility, fostering an environment that promotes trust and equity.

This type of research is a quantitative study using a cross-sectional design in which the researcher measures the variables once and measures the variables at the time of the examination. The sampling technique in this study was simple random sampling. The sample in this research is 228 employees. Data analysis used in this study was univariate, bivariate and multivariate data analysis.

The results of this study indicate that there is a relationship between accountability ($p=0.004$) and independence ($p=0.001$) to the performance of RSUD Dr Salim Alkatiri, South Buru Regency, and there is no relationship between accountability ($p=0.121$) and fairness ($p=0.121$) on the performance of RSUD Dr Salim Alkatiri, South Buru Regency. Based on the multivariate test the most influential variable is the independence variable with a value of B (1.092) and OR (2.980) which indicates that the effect of independence has a greater chance of affecting the performance of Dr Salim Alkatiri Hospital, South Buru Regency.

Therefore this study are expected to provide input for DR Salim Alkatiri Hospital in South Buru Regency in making decisions about good corporate governance policies, besides that it is expected to help solve performance problems that often occur in a company

Keywords: Good Corporate Governance, Performance, Hospitals.



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Rsd Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan”** yang merupakan bentuk persyaratan dalam rangka penyelesaian program pendidikan Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, penulis mengalami banyak hambatan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari semua pihak semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. H. Amran Razak, SE, M.Sc** sebagai Ketua Komisi penasihat dan **Dr. Balqis, SKM, M.Kes, M.Sc.PH** sebagai Anggota Komisi Penasihat yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, arahan, dorongan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini. Kemudian penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr. Jamaluddin Jompa.,M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Sukri Palutturi, SKM.,M.Kes.,M.Sc.PH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Indar, SH.,M.PH selaku Ketua Program Studi S2 Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Sukri Palutturi, SKM.,M.Kes.,M.Sc.PH.,Ph.D, Dr. Furqaan Naiem, M.Sc.,Ph.D, Ansariadi, SKM., M.Sc.PH.,Ph.D selaku tim penguji yang

telah memberikan masukan, bimbingan, serta perbaikan demi menyempurnakan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Seluruh staf pegawai Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sungguh bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritikan, saran dan masukan selalu sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Akhir kata semoga bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak memperoleh balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KESLIAN NASKAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i>	12
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Rumah Sakit	24

D. Sintesa Penelitian	28
E. Kerangka Teori.....	33
F. Kerangka Konsep.....	36
G. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	37
H. Hipotesis Penelitian.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Pengumpulan Data	48
E. Pengolahan dan Penyajian Data	49
F. Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 2. 1 Sintesa Penelitian	28
2. Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Departemen/Bagian.....	54
3. Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan.....	55
4. Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik.....	56
5. Tabel 4. 4 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Akuntabilitas (Accountability) RSUD Dr Salim Alkatiri	57
6. Tabel 4. 5 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pertanggung Jawaban (Responsibility) RSUD Dr Salim Alkatiri	57
7. Tabel 4. 6 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kemandirian (Independency) RSUD Dr Salim Alkatiri	58
8. Tabel 4. 7 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kewajaran (Fairness) RSUD Dr Salim Alkatiri.....	58
9. Tabel 4. 8 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	59
10. Tabel 4. 9 Hubungan akuntabilitas (accountability) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	59
11. Tabel 4. 10 Hubungan pertanggung jawaban (Responsibility) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	60

12. Tabel 4. 11 Hubungan Kemandirian (Independency) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	61
13. Tabel 4. 12 Hubungan Kewajaran (Fairness) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	62
14. Tabel 4. 13 Hasil Analisis Multivariat Pembuatan Model Faktor Penentu antara Variabel Independen dan dan Variabel Dependen	63
15. Tabel 4. 14 Hasil Analisis Multivariat Kemandirian dan Akuntabilitas terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan	64

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2. 1 Kerangka Teori	33
2. Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*). Selanjutnya pada pasal 36 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Hal ini menunjukkan urgensi dari penerapan dari penerapan sistem tata kelola rumah sakit di setiap rumah sakit guna melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang sangat penting (Harma et al., 2020).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Good Clinical Governance* (GCG) merupakan struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI*, tujuan dari GCG adalah untuk menciptakan nilai tambah

perusahaan bagi semua pihak yang berkepentingan. GCG digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan perusahaan dalam menjalankan strateginya dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki sehingga hubungan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan menjadi baik (Waslyanti et al., 2019).

Organisasi Rumah Sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pelaksanaan dari prinsip GCG dalam Rumah Sakit memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top management. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka harapan yang baik dari implementasi *good corporate governance* (GCG) hanya akan berakhir pada tataran konsep, sehingga tidak memberi nilai tambah bagi organisasi (Effendi, 2009).

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) bagi rumah sakit merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk dapat mengikuti aturan yang berubah dan akan selalu berubah. Tata kelola yang baik dapat membuat seluruh stakeholder rumah sakit merasakan keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) (Harma et al., 2020).

Good corporate governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan prinsip yang universal, sehingga dapat ditemukan pada budaya di mana saja, yang membedakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di suatu negara adalah sebagai sistem karena harus menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta budaya bangsa itu sendiri (Wibowo, 2010).

Salah satu bidang jasa yang memegang peranan cukup penting bagi masyarakat adalah pelayanan rumah sakit. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pihak rumah sakit dalam hal pemenuhan kepuasan pasien membuat pihak rumah sakit harus mampu untuk mengembangkan manajemen mutu yang sebaik-baiknya. Kepuasan pasien dalam hal ini adalah masyarakat tidak cukup hanya jika penyakitnya disembuhkan tetapi pada segi lain, pasien juga menuntut untuk diberi pelayanan sebaik mungkin. Semua itu harus dipecahkan oleh pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan (Hadijah, 2016).

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. UU Kesehatan No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 36 mewajibkan rumah sakit harus melaksanakan *good corporate governance* dalam

menjalankan fungsinya sebagai institusi penyelenggara kesehatan. setiap rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. UU No.44 tahun 2009 Pasal 34 menjelaskan bahwa pemilik rumah sakit tidak diperkenankan merangkap menjadi kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Selain itu, kepala rumah sakit atau direktur harus seorang dokter yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang rumah sakit (Zaeni & Sawarjuwono, 2019).

Rumah sakit sebagai salah satu instansi pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban baik secara keuangan maupun non-keuangan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja yang mencakup semua aspek good governance merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan kepuasan kerja sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kinerja rumah sakit merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu rumah sakit dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. (Harma et al., 2020).

Pengimplementasian good corporate governance sangat penting untuk memberikan kepuasan kerja pegawai rumah sakit. Penelitian yang dilakukan oleh Vinda Andani dan Akhmad Riduwan (2015) mengatakan bahwa good governance memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dan kepuasan kerja. Salah satu hal penting untuk dilihat adalah bagaimana kepuasan kerja pegawai terhadap penerapan prinsip good

governance di perusahaannya karena kepuasan kerja penting untuk mendorong kinerja karyawan sehingga kinerja rumah sakit juga baik (Faradita, 2018).

Berdasarkan Undang Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance). Selanjutnya pada pasal 36 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Hal ini menunjukkan urgensi dari penerapan dari penerapan sistem tata kelola rumah sakit di setiap rumah sakit guna melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang sangat penting. (Pribadi, 2015)

Perjalanan penerapan prinsip GCG di RSUD dr. Salim Alkatiri ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan-kebijakan, selain itu juga efektifitas dari pengorganisasian di RSUD dr. Salim alkatiri ini juga perlu dimaksimalkan. Sesuai dengan Undang Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, maka untuk mendapatkan suatu perorganisasian yang baik maka RSUD dr. Salim Alkatiri perlu memiliki kecukupan Struktur organisasi serta infrastruktur yang

ada untuk mendapatkan suatu proses perorganisasian yang baik agar mendapatkan suatu kinerja rumah Sakit yang dicapai.

Rumah Sakit disamping wajib melayani kebutuhan masyarakat terkait pelayanan Kesehatan yang baik, rumah sakit juga harus mampu menunjukkan tata kelolanya dengan baik agar bisa lebih mandiri dan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) seperti yang di amanatkan PP No. 23 Tahun 2005 bahwa Rumah Sakit Pemerintah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

Berdasarkan dari data profil RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan, kinerja pelayanan rawat jalan dan rawat inap ada penurunan jumlah kunjungan baik pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap serta Jumlah Keseluruhan Kunjungan RS pada tiga tahun terakhir 2019 terdapat 6884 kunjungan, tahun 2020 terdapat 4247 kunjungan dan tahun 2021 sebanyak 2924 kunjungan. Ini di sebabkan karena pada tahun 2019 dan puncaknya tahun 2020 telah terjadi wabah Covid-19 yang mengharuskan semua RS harus menyesuaikan prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Pusat terkait Prosedur Penanganan Pasien Covid-19.

Berdasarkan dari data profil RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan, dalam tiga tahun terakhir pada indikator kinerja pelayanan yaitu, Pada Indikator BOR (Bed Ocupancy Rate), tidak ada perubahan dari tahun

sebelumnya 2020 yakni 7% dan masih jauh dari kategori standar ideal yaitu 60-80%, untuk AVLOS pada tiga tahun terakhir masih sama, tetapi masih di bawah standar ideal 6-9 hari, yaitu hanya 3 hari. TOI (Turn Over Interval) ada kenaikan dari tahun sebelumnya (2020) dan masih jauh dari standar ideal nya yaitu 1-3 hari. BTO (Bed Turn Over) juga terjadi penurunan indikator dari sebelumnya 11x menjadi 10x dan msh jauh dari standar idealnya yaitu >30x. Untuk NDR (Net Death Rate), dibandingkan dengan tahun 2019 dengan 25%, untuk tahun 2021 ini turun cukup signifikan menjadi 7% dan Kembali lagi belum memenuhi standar ideal. Sedangkan GDR (Gross Death Rate) dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan sebesar 39% hal ini menunjukkan trend yang positif akan tetapi masih belum dikatakan standar ideal. Secara keseluruhan Indikator Kinerja Pelayanan di tahun 2019, 2020 dan 2021 masih terjadi penurunan dan masih belum masuk kategori Standar Ideal yang sudah ditentukan. Ini disebabkan karena dalam 3 tahun terakhir ini RSUD dr. Salim Alkatiri terkena dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan Penurunan Jumlah Pasien. Pencapaian dari data di atas masih di bawah standar ideal dan cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja rumah sakit masih perlu di organisir dengan baik.

Tuntutan masyarakat (publik) ini adalah penyelenggaraan dan penciptaan lembaga-lembaga sektor publik yang *good governance*. Rumah

sakit sebagai organisasi sektor publik dalam pengelolaannya belum sesuai dengan harapan masyarakat di daerah, masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari rumah sakit, transparansi dan akuntabilitas publik dirasa masih kurang (Lestari, 2013).

Prinsip GCG ini bisa dibilang suatu system yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya prinsip-prinsip yang didalamnya sangat menentukan suatu perusahaan bisa dikelola dengan baik atau tidak. Prinsip ini juga bisa menentukan arah kebijakan untuk mendapatkan tujuan suatu perusahaan serta kinerja Rumah Sakit yang baik demi tercapainya visi dan misi yang di cita-citakan bersama. Dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit, prinsip ini menjadi tolak ukur dalam menentukan visi rumah sakit seperti Visi dari RSUD dr. Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan yaitu *“Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat pelayanan dan perluasan akses rujukan kesehatan yang berkualitas, ditunjang dengan pelayanan professional dan terjangkau bagi masyarakat”*. Visi tersebut pun di didalamnya masih terkandung prinsip-prinsip dari GCG ini.

Menerapkan Prinsip – prinsip yang terdapat di dalam GCG ini pada parakteknya tidaklah mudah apalagi dalam meningkatkan Kinerja Rumah Sakit itu sendiri, kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal maupun eskternal yang dapat menghambat proses penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada RSUD dr. Salim Alkatiri. Akan

tetapi kendala-kendala tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi dan merupakan suatu tantangan bagi RSUD dr. Salim Alkatiri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan akuntabilitas (*accountability*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
- b. Untuk mengetahui hubungan pertanggungjawaban (*responsibility*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
- c. Untuk mengetahui hubungan kemandirian (*independency*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
- d. Untuk mengetahui hubungan kewajaran (*fairness*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi atau bacaan guna menambah pengetahuan bagi peneliti berikutnya, serta dapat menjadi tindak lanjut untuk peneliti lain.

2. Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Rumah Sakit dalam memenuhi kebutuhan pasien serta memberikan pelayanan yang terbaik.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam menambah wawasan dan *softskill* serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya *Corporate Governance-Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower. Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006 (Prabowo, 2018).

Good governance mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990, hal ini dikarenakan adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain. Istilah "*Good Governance*" diartikan sebagai berikut yaitu Good adalah nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan

nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan (Sopana et al., 2020).

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. *Good governance* adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Waslyanti et al., 2019).

Good Corporate Governance atau Tata kelola perusahaan adalah seni mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Ini sering melibatkan penyelesaian konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa organisasi dikelola dengan baik yang berarti bahwa proses, prosedur, dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Hermawati, 2021).

Konsep *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang menatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Sudarmanto et al., 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

2. Manfaat *Good corporate governance*

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good corporate governance* menurut Hery (2010), yaitu:

- a. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- e. Mengurangi korupsi.

3. Unsur-Unsur Good corporate governance

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu:

1. Corporate Governance – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a) Pemegang saham
- b) Direksi
- c) Dewan komisaris

- d) Manajer
- e) Karyawan
- f) Sistem remunerasi berdasar kinerja
- g) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- a) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure)
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Kesetaraan
- e) Aturan dari *code of conduct*

2. Corporate Governance – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b. Investor
- c. Institusi penyedia informasi
- d. Akuntan public
- e. Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*

Ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu (Pertiwi & Pratama, 2012):

1) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

2) Faktor Internal

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor:

KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Lima prinsip dasar Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas – tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Accountability ataupun akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Dalam hal kesehatan, akuntabilitas menggambarkan kemampuan pihak rumah sakit untuk mematuhi dan mempertanggungjawabkan kebijakan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit (Sedarmayanti, 2012).

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen.

d. Independensi

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Keadilan atau kewajaran

Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Secara sederhana, fairness ataupun kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness ataupun kewajaran diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pihak – pihak terkait baik itu kepada rumah sakit ataupun pasien atas kecurangan dan penipuan yang merugikan (Sedarmayanti, 2012).

Menurut (Sutedi, 2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.

Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan pengawasan.

3. *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan 14 perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Rumah Sakit

1. Pengertian Kinerja Rumah Sakit

Kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Menurut Suntoro yang dimuat oleh Pabundu (2006:121) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu.

Bernadin dan Rusel yang termasuk dalam Pabundu (2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa kinerja hasil dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

Dari beberapa pendapat pendapat diatas, maka konsep suatu kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, serta kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang diterapkan.

Kinerja rumah sakit merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu rumah sakit dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan. Konsep kinerja organisasi seperti ini menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugas dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

2. Pendekatan dan Indikator Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2006: 267) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Menurut Sinambola (2012:196) ada 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Produktivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang menjadi indikator dari responsivitas adalah kemampuan organisasi menjalankan misi dan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Responsibilitas

Responsibilitas mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi.

d. Akuntabilitas

Mengukur seberapa besar penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar penyusunan imbalan atau intensif perusahaan. Selama ini, pengukuran kinerja hanya dilakukan secara tradisional dan hanya menitik beratkan pada sisi finansial atau keuangan saja. Perusahaan dengan pencapaian hasil keuangan yang tinggi dianggap sebagai perusahaan yang berhasil. Padahal, dalam mengukur kinerja suatu perusahaan tidak hanya melihat dari sisi keuangan tetapi juga non keuangan (Parmita. 2015).

D. Sintesa Penelitian

Tabel 2. 1 Sintesa Penelitian

NO	Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Harma et al., 2020) Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar	penelitian menggunakan pendekatan cross sectional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap kepuasan kerja p 0,000 < 0,05, good governance berpengaruh terhadap kinerja p 0,019 < 0,05, kinerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja p 0,000 < 0,05, penerapan good governance berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja p 0,000 < 0,05 dan variabel good governance pada dimensi accountability terhadap kepuasan kerja melalui kinerja p 0,000 < 0,05.
2.	(Waslyanti et al., 2019) Hubungan Peranan Good Coorporate Governance Dengan Kepuasan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peranan Good Coorporate Governance dengan kepuasan pasien rawat	Metode analisis menggunakan uji Statistik yakni uji chi square dan uji Phi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara fairness (kewajaran) dengan kepuasan pasien rawat jalan (X2 hitung = 17,352, dengan nilai $\phi =$

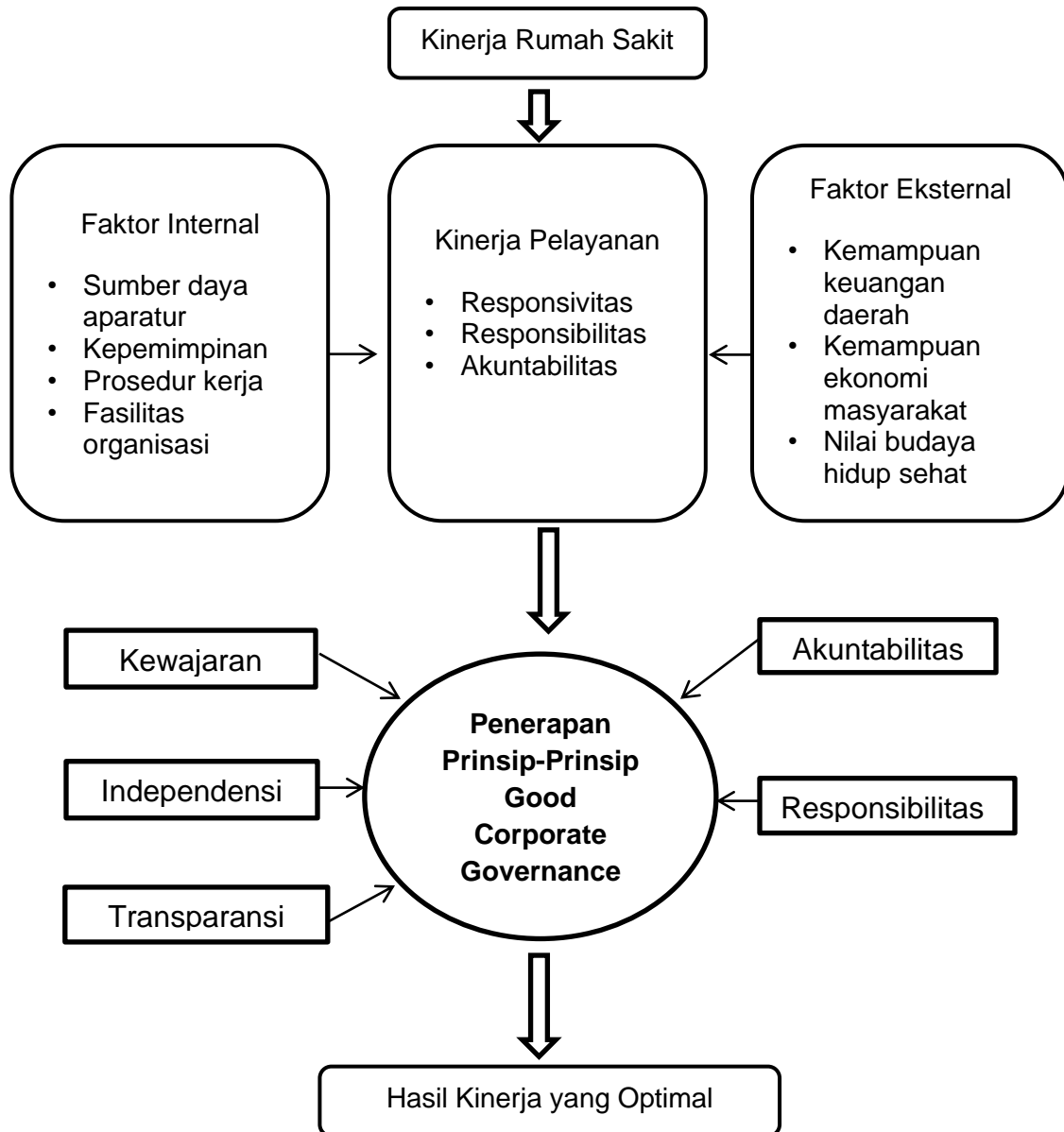
	Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Oheo Kelurahan Inomoiyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara	jalan di Puskesmas Oheo Kelurahan Linomoiyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019		0.557), ada hubungan lemah antara disclosure dan transparency (transparansi) dengan kepuasan pasien rawat jalan (X^2 hitung = 7,289, dengan nilai $\phi = 0.361$), ada hubungan sedang antara accountability (akuntabilitas) dengan kepuasan pasien rawat jalan (X^2 hitung = 13,763, dengan nilai $\phi = 0.496$) dan ada hubungan lemah antara responsibility (responsibilitas) dengan kepuasan pasien rawat jalan (X^2 hitung = 6,310, dengan nilai $\phi = 0.336$).
3.	(Zaeni & Sawarjuwono, 2019) Implementasi Good Corporate Governance Pada Rs. Orthopedi Dan Traumatology Surabaya	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi good corporate governance pada RS. Orthopedi dan Traumatology Surabaya	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah RS. Orthopedi dan Traumatology Surabaya belum melaksanakan good corporate governance secara menyeluruh. Rumah sakit masih memiliki kekurangan dalam implementasi prinsip fairness, transparency dan accountability. Rumah sakit belum memperlakukan pemegang saham secara adil.

				Rumah sakit belum menyajikan laporan keuangan secara transparan kepada direktur dan pemilik saham minoritas dan rumah sakit belum menerapkan prinsip akuntabilitas sepenuhnya karena belum mempunyai SPI untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4.	(Rauf et al., 2020) Good Corporate Governance (GCG) dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pendorong Di Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pendorong di Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain Cross Sectional	Penelitian ini menemukan adanya pengaruh tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, transparency, accountability, independency, fairness terhadap tingkat kepuasan Pendorong dengan $p < 0.05$
5.	(Kesuma & Nurhayati, 2020) Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dalam	Tujuan dari penelitian ini untuk mengalisis pengaruh Good Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau dan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada Rumah Sakit

	Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Di Kota Lubuklinggau Dan Kabupaten Musi Rawas Dengan Pendekatan Balanced Scorecard	Kabupaten Musi Rawas dengan Pendekatan Balanced Scorecard		Sobirin dan Rumah Sakit Siti Aisyah baik secara parsial maupun simultan
6.	(Tiara Pertiwi, 2016) Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta)	Tujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan budaya organisasi terhadap kinerja Rumah Sakit Panti Rini.	Jenis penelitian studi kasus, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode <i>convenience sampling</i> .	Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1. Prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> mempengaruhi kinerja rumah sakit panti Rini. 2. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja Rumah Sakit Panti Rini.
7.	(Asmarani Harma, Reza Aril Ahri, Jasmin Ambas) Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar	Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar	Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, sampel pada penelitian ini adalah pegawai rumah sakit sebanyak 126 menggunakan metode stratified	Ada pengaruh good governance terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh good governance terhadap kinerja, ada pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh good governance terhadap kepuasan kerja melalui kinerja, good governance pada dimensi accountability paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja

			proportional random sampling	di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar
8.	(Yudhi Pratama, 2019) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin Di Kabupaten Bone	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin di Kab. Bone	Populasi penelitian ini adalah karyawan pada bidang keuangan dan bidang corporate Pada Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin di Kab. Bone. Dalam penelitian ini jumlah pengambilan sampel sama dengan populasi sebanyak 32 orang. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Rumah Sakit Dr. Muh. Yasin di Kab. Bone

E. Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), (2006);
Teori kinerja organisasi dari Higgins (2007).

Kinerja rumah sakit merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu rumah sakit dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan.

Good Corporate adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi

Kinerja dipengaruhi faktor sumber daya nonfisik seperti informasi dan juga responsiveness, responsibilities dan akuntabilitas, faktor-faktor ini merupakan prinsip-prinsip good governance yang mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi.

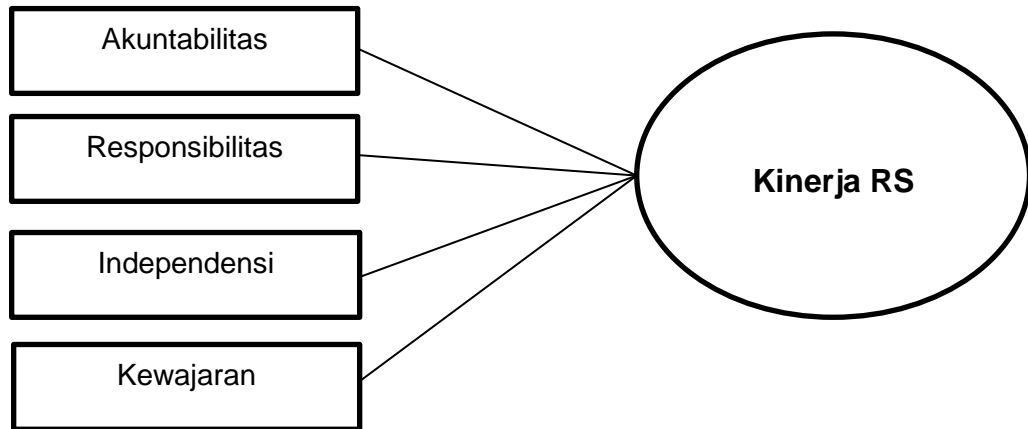
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham.

3. **Responsibilitas** adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. **Independensi** adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun.
5. **Kewajaran dan kesetaraan**, Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.

Berdasarkan teori kinerja organisasi oleh Higgins (2007) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Faktor internal berupa sumber daya aparatur, kepemimpinan, fasilitas organisasi dan prosedur kerja (SOP). Sedangkan faktor eksternal mencakup kemampuan keuangan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat dan nilai-nilai sosial tentang kesehatan.

E. Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

Keterangan :

 = Variabel Independen

 = Variabel Dependen

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Kriteria Objektif

1. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (Akuntabilitas) dalam penelitian ini adalah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ rumah sakit dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi. Mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peran dalam pelaksanaan GCG. Pelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpegang pada etika dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala Likert yaitu sebagai berikut:

Jumlah pertanyaan : 3

Jumlah kategori : 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Skor tertinggi : 5

Skor terendah : 1

Skor tertinggi : jumlah pertanyaan x skor tertinggi

: 3 x 5

: 15 (100%)
 Skor terendah : jumlah pertanyaan x skor terendah
 : 3 x 1
 : 3 (20%)
 Kisaran (Range) : skor tertinggi – skor terendah
 : 15 (100%) - 3 (20%)
 : 12 (80 %)

Interval : 12 (80%) / 2
 : 6 (40%)

Skor yang diinginkan: skor tertinggi – interval
 : 15 (100%) - 6 (40%)
 : 9 (60%)

Kriteria Objektif

Baik : jika skor jawaban responden \geq 60% (9)

Kurang Baik : jika skor jawaban responden $<$ 60% (9)

2. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Pertanggungjawaban) dalam penelitian ini adalah melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap pasien, menciptakan kenyamanan dan keamanan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan yang telah

ditetapkan. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala Likert yaitu sebagai berikut:

Jumlah pertanyaan : 3

Jumlah kategori : 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Skor tertinggi : 5

Skor terendah : 1

Skor tertinggi : jumlah pertanyaan x skor tertinggi

: 3 x 5

: 15 (100%)

Skor terendah : jumlah pertanyaan x skor terendah

: 3 x 1

: 3 (20%)

Kisaran (Range) : skor tertinggi – skor terendah

: 15 (100%) - 3 (20%)

: 12 (80 %)

Interval : 12 (80%) / 2

: 6 (40%)

Skor yang diinginkan: skor tertinggi – interval

: 15 (100%) - 6 (40%)

: 9 (60%)

Kriteria Objektif

Baik : jika skor jawaban responden \geq 60% (9)

Kurang Baik : jika skor jawaban responden $<$ 60% (9)

3. *Independency* (Kemandirian)

Independency (Kemandirian) dalam penelitian ini adalah ketersediaan tenaga kerja ahli disetiap bagian dalam pelaksanaan kinerjanya. Adanya tanggung jawab sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. Pengambilan keputusan secara objektif, tanpa adanya intervensi dan kepentingan dari pihak manapun. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala Likert yaitu sebagai berikut:

Jumlah pertanyaan : 3

Jumlah kategori : 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Skor tertinggi : 5

Skor terendah : 1

Skor tertinggi : jumlah pertanyaan x skor tertinggi
: 3 x 5
: 15 (100%)

Skor terendah : jumlah pertanyaan x skor terendah
: 3 x 1
: 3 (20%)

Kisaran (Range) : skor tertinggi – skor terendah
: 15 (100%) - 3 (20%)
: 12 (80 %)

Interval : 12 (80%) / 2
: 6 (40%)

Skor yang diinginkan: skor tertinggi – interval
: 15 (100%) - 6 (40%)
: 9 (60%)

Kriteria Objektif

Baik : jika skor jawaban responden \geq 60% (9)

Kurang Baik : jika skor jawaban responden $<$ 60% (9)

4. *Fairness* (Kewajaran)

Fairness (Kewajaran) dalam penelitian ini adalah sikap adil dan setara seperti tersedianya pelayanan yang berkualitas, sistem penilaian kinerja melalui sistem informasi yang baik, memberikan kesempatan

yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan gender. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala Likert yaitu sebagai berikut:

Jumlah pertanyaan : 3

Jumlah kategori : 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Skor tertinggi : 5

Skor terendah : 1

Skor tertinggi : jumlah pertanyaan x skor tertinggi

: 3 x 5

: 15 (100%)

Skor terendah : jumlah pertanyaan x skor terendah

: 3 x 1

: 3 (20%)

Kisaran (Range) : skor tertinggi – skor terendah

: 15 (100%) - 3 (20%)

: 12 (80 %)

Interval : 12 (80%) / 2

: 6 (40%)

Skor yang diinginkan: skor tertinggi – interval

: 15 (100%) - 6 (40%)

: 9 (60%)

Kriteria Objektif

Baik : jika skor jawaban responden \geq 60% (9)

Kurang Baik : jika skor jawaban responden $<$ 60% (9)

5. Kinerja Rumah Sakit

Kinerja Rumah Sakit dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, sistem kepemimpinan, prosedur kerja, fasilitas kesehatan, program, sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan kinerja keuangan. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala Likert yaitu sebagai berikut:

Jumlah pertanyaan : 7

Jumlah kategori : 5

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Skor tertinggi : 5

Skor terendah : 1

Skor tertinggi : jumlah pertanyaan x skor tertinggi
: 7 x 5
: 35 (100%)

Skor terendah : jumlah pertanyaan x skor terendah
: 7 x 1
: 7 (20%)

Kisaran (Range) : skor tertinggi – skor terendah
: 35 (100%) - 7 (20%)
: 28 (80 %)

Interval : 28 (80%) / 2
: 14 (40%)

Skor yang diinginkan: skor tertinggi – interval
: 35 (100%) - 14 (40%)
: 21 (60%)

Kriteria Objektif

Baik : jika skor jawaban responden \geq 60% (21)

Kurang Baik : jika skor jawaban responden $<$ 60% (21)

G. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Null (Ho)
 - a. Tidak ada hubungan akuntabilitas (*accountability*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - b. Tidak ada hubungan pertanggungjawaban (*responsibility*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - c. Tidak ada hubungan kemandirian (*independency*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - d. Tidak ada hubungan kewajaran (*fairness*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
2. Hipotesis Alternatif (Ha)
 - a. Ada hubungan akuntabilitas (*accountability*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - b. Ada hubungan pertanggungjawaban (*responsibility*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - c. Ada hubungan kemandirian (*independency*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan
 - d. Ada hubungan kewajaran (*fairness*) terhadap kinerja RSUD Dr Salim Alkatiri Kabupaten Buru Selatan